



Article Informations  
Corresponding Email:  
sthasnac@gmail.com

Received: 11/02/2025; Accepted:  
22/02/2025; Published: 30/06/2025

## **KERJASAMA AUSTRALIA DENGAN FILIPINA MELALUI MARITIME COOPERATIVE ACTIVITY (MCA) DI KAWASAN INDO-PASIFIK TAHUN 2023**

**Siti Hasna Chairunnisa<sup>1)</sup>, Iing Nurdin<sup>2)</sup>, Taufan Herdansyah Akbar<sup>3)</sup>**

<sup>1,2,3)</sup> Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

### **Abstrak**

Penelitian ini menganalisis mengenai kerja sama Australia dalam kerja sama dengan Filipina melalui *Maritime Cooperative Activity* (MCA) di Kawasan Indo-Pasifik. Penelitian ini difokuskan pada kepentingan nasional Australia dalam kerja sama MCA yang dilakukan bersama Filipina. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif dengan data primer dan sekunder. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori neorealisme yang dikemukakan oleh Kenneth Waltz, konsep kepentingan nasional dan kerja sama internasional yang dikemukakan oleh K.J Holsti. Hasil penelitian ini dipaparkan mengenai kepentingan apa yang dimiliki Australia dalam kerja sama MCA. Kepentingan tersebut mencakup 3 kategori yaitu *Core Value*, *Middle-Range Objectives*, dan *Long-Range Objectives*.

**Kata Kunci:** Kepentingan Nasional, Australia, Filipina, Indo-Pasifik, *Maritime Cooperative Activity*

### **Abstract**

*This study analyzes Australia's cooperation with the Philippines through the Maritime Cooperative Activity (MCA) in the Indo-Pacific region. The research focuses on Australia's national interests in the MCA collaboration with the Philippines. The study employs a descriptive qualitative research method using primary and secondary data. The theories used in this research include neorealism by Kenneth Waltz, as well as the concepts of national interest and international cooperation by K.J. Holsti. The findings of this study elaborate on Australia's interests in the MCA cooperation, which are categorized into three groups: Core Values, Middle-Range Objectives, and Long-Range Objectives.*

**Keywords:** National Interests, Australia, The Philippines, Indo-Pacific, *Maritime Cooperative Activity*

## **PENDAHULUAN**

Kawasan Indo-Pasifik merupakan kawasan yang membentang dari Samudra Hindia di timur hingga Samudra Pasifik di barat, dihubungkan oleh Selat Malaka, telah menjadi tempat penting untuk kegiatan geopolitik, keamanan, perdagangan, dan lingkungan hidup. Karena posisi strategisnya yang menghubungkan dua samudra besar dan memiliki banyak selat sempit yang menjadi jalur pelayaran internasional, wilayah ini menjadi perhatian global (Tertia et al. 2018). Terlepas dari perannya yang sangat penting, kawasan maritim Indo-Pasifik memiliki berbagai tantangan keamanan maritim yang mengancam negara-negara di kawasan tersebut. Potensi besar kawasan Indo-Pasifik telah menarik perhatian berbagai negara kuat, yang memanfaatkan pengaruh mereka untuk mencapai kepentingan nasional, sehingga menciptakan dinamika keamanan yang kompleks di wilayah tersebut (Tertia et al. 2018). Tantangan keamanan tersebut mencakup seperti perompakan, penyeludupan, pembajakan, terorisme, klaim wilayah, sengketa yuridiksi, dan kejahatan maritim lintas negara lainnya yang dapat mengganggu stabilitas kawasan (Mahnken 2011).

Australia terletak di persimpangan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, sebuah posisi strategis yang membentuk perspektif uniknya terhadap konsep Indo-Pasifik. Dalam pandangan Australia, konsep Indo-Pasifik mencerminkan pergeseran tatanan regional dari yang sebelumnya berpusat pada dominasi Amerika Serikat, menuju suatu lanskap baru yang ditandai oleh persaingan strategis dan kerja sama antara Amerika Serikat dan Tiongkok (Izuyama and Ishihara 2019). Dengan menekankan pentingnya lingkungan maritim dalam strategi dan kemitraan militer, Indo-Pasifik digambarkan sebagai kawasan yang terus berkembang, tempat Australia menjalankan strategi dan memperluas pengaruhnya (Alexander and Adducul 2018). Australia juga berupaya untuk memainkan peran yang lebih besar dalam memelihara stabilitas dan keamanan di wilayah Indo-Pasifik, dengan meningkatkan kapabilitas pertahanan dan keterlibatannya dalam kemitraan keamanan regional.

Di Australia, istilah Indo-Pasifik pertama kali muncul dalam Buku Putih Pertahanan tahun 2013 saat pemerintahan Perdana Menteri Julia Gillard. Dokumen tersebut menegaskan bahwa Australia memandang Indo-Pasifik sebagai kawasan strategis, menggantikan konsep wilayah Asia-Pasifik yang lebih luas. Selain itu, Buku Putih tersebut mengindikasikan bahwa keamanan Australia bergantung pada dua faktor utama, yaitu menjaga stabilitas di kawasan terdekat seperti Asia Tenggara dan Pasifik Selatan, serta mendukung ketertiban di Indo-Pasifik dengan berlandaskan prinsip-prinsip global yang berlaku (Rosdiana 2021). Australia mengusung visi Indo-Pasifik yang terbuka (FOIP), meskipun belum menerbitkan buku strategi khusus. Namun, Buku Putih Kebijakan Luar Negeri 2017 menegaskan bahwa promosi kawasan Indo-Pasifik yang terbuka, inklusif, dan makmur adalah salah satu dari lima prioritas utama bagi keamanan dan kemakmuran Australia (Department of Foreign Affairs 2017). Strategi ini mencerminkan kepentingan Australia dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik.

Filipina, yang terletak di Indo-Pasifik, menghadapi tantangan maritim seperti kejahatan transnasional dan sengketa dengan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. Sebagai mitra keamanan jangka panjang Australia, hubungan diplomatik kedua negara telah terjalin sejak 1946 (Misalucha-Willoughby and Domingo 2019). Memanasnya kembali Indo-Pasifik, terutama di Laut Tiongkok Selatan, membuat Filipina menghadapi ketegangan dalam sengketa wilayah dengan Tiongkok. Meski Presiden Marcos Jr. dan Xi Jinping berkomitmen mengelola hubungan secara damai, Tiongkok tetap melakukan manuver yang melanggar kedaulatan Filipina, mengancam stabilitas regional dan keamanan nasional (Gill 2023). Tiongkok terus melakukan manuver provokatif terhadap Filipina, termasuk insiden pada Februari 2023 ketika Pasukan Penjaga Pantai Tiongkok (CCG) mengarahkan laser militer ke kapal Filipina di ZEE sekitar Ayungin Shoal. Pada Maret, kapal PLAN dan CCG, bersama 42 kapal milisi maritim, muncul di sekitar Pag-asa. Setelah kunjungan Menlu Tiongkok ke Manila pada April, CCG kembali melakukan aksi berbahaya terhadap kapal Filipina di ZEE (Gill 2023).

Filipina meningkatkan pertahanan teritorial dan keamanan maritim dengan memperkuat kemitraan, termasuk dengan Australia. Hubungan bilateral yang semakin erat mencerminkan tekad Filipina untuk membangun kemitraan strategis dengan negara-negara berpikiran sama di Indo-Pasifik guna menghadapi ketegangan geopolitik dan kepentingan strategis di kawasan (Bautista 2024). Australia dan Filipina kemudian meningkatkan kembali hubungan bilateral mereka dari Kemitraan Komprehensif menjadi Kemitraan Strategis. Pada 8 September 2023, Australia dan Filipina meningkatkan hubungan dari Kemitraan Komprehensif menjadi Kemitraan Strategis. PM Australia Anthony Albanese menegaskan komitmennya terhadap Asia Tenggara, sementara Presiden Filipina Marcos Jr. berupaya memperkuat kemitraan keamanan sejalan dengan sikapnya yang lebih asertif terhadap Tiongkok (Baquisal 2023). Kerja sama yang terjalin ini dilaksanakan setelah sebelumnya hubungan Australia dan Filipina mengalami kerenggangan. Di bawah pemerintahan Duterte, Filipina cenderung mendekat ke Tiongkok, menimbulkan kekhawatiran tentang jarak dari AS dan sekutunya di Asia. Selain itu, hubungan keamanan Australia dan Filipina sebelumnya hanya berfokus pada kontra-terorisme (Halvorson and West 2020).

Kemitraan Strategis Australia-Filipina, sebagaimana tertuang dalam deklarasi bersama, menegaskan kepentingan bersama dalam menjaga perdamaian dan kemakmuran Indo-Pasifik. Kemitraan ini mencakup pertahanan, keamanan maritim, kontra-terorisme, serta kerja sama di bidang iklim, pendidikan, dan pembangunan (Presidential Communications Office Philippines 2023). Keduanya juga berkomitmen memperkuat kerja sama pertahanan melalui latihan dan patroli bersama di Laut Tiongkok Selatan. Australia dan Filipina mengimplementasikan Kemitraan Strategis melalui *Maritime Cooperative Activity* (MCA), latihan militer gabungan dengan angkatan laut berbagai negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan interoperabilitas, kerja sama regional, serta mendukung Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. MCA mencakup pelayaran bersama, latihan komunikasi, dan operasi maritim tingkat lanjut untuk memperkuat koordinasi dan pertukaran informasi (Defence Minister of Australian Government 2023).

Kegiatan MCA Australia-Filipina dilaksanakan setiap tahun, dimulai dengan patroli bersama antara *Australia Defense Force* (ADF) dan *Armed Forces of the Philippines* (AFP). Patroli udara dan laut perdana berlangsung pada 25-27 November 2023 di ZEE Filipina (Departement of National Defense Republic of The Philippines 2023). MCA menegaskan komitmen kedua negara terhadap navigasi sesuai hukum internasional demi Indo-Pasifik yang stabil. Dalam patroli ini, Filipina mengerahkan dua kapal angkatan laut dan lima pesawat pengintai, sementara Australia mengoperasikan kapal perang HMAS Toowoomba dan pesawat P-8A (Romana 2023). Ketegangan di Indo-Pasifik mendorong kerja sama Australia dan Filipina dalam *Maritime Cooperative Activity* (MCA) untuk meningkatkan keamanan maritim dan interoperabilitas. Stabilitas kawasan sangat penting bagi Australia, tetapi ancaman yang ada menciptakan tantangan bagi kepentingan nasional. Meski bertujuan memperkuat kerja sama maritim, MCA juga dianggap sebagai respons terhadap meningkatnya asertivitas Tiongkok. Kerja sama ini mencerminkan kepentingan strategis Australia di Indo-Pasifik.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berfokus pada pemahaman menyeluruh terhadap fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya serta dilakukan secara deskripsi dengan menggunakan bahasa dan kata-kata dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong 2018). Penggunaan metode ini digunakan untuk dapat memahami dan menjelaskan terkait fenomena yang akan diteliti yaitu kepentingan Australia dalam kerja sama dengan Filipina melalui *Maritime Cooperative Activity* (MCA). Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder dengan instrumen penelitian yaitu peneliti sendiri.

## **PEMBAHASAN**

Analisis mengenai kerja sama Australia dengan Filipina melalui *Maritime Cooperative Activity* (MCA) dapat dilihat melalui kepentingan nasional Australia. Kepentingan nasional ini kemudian dianalisis dengan menggunakan konsep kepentingan nasional K.J Holsti sebagai sebuah konsep yang digunakan untuk menganalisis hubungan luar negeri suatu negara untuk dapat menjelaskan bagaimana suatu negara berperilaku dalam

hubungan luar negerinya. K.J Holsti mengkategorikan kepentingan nasional dalam 3 kategori, yaitu 1) *Core Values*; jenis tujuan yang membuat kebanyakan negara berani berkorban untuk mencapainya, 2) *Middle-range Objectives*; Tujuan dalam kategori ini mencakup pemenuhan kebutuhan ekonomi, meningkatkan prestise sebuah negaradalam sistem, serta berbagai bentuk keselamatan diri, dan 3) *Long-range Objectives*; Tujuan ini berisi serangkaian rencana, cita-cita dan pandangan mengenai kaidah politik dan pengaturan ideologi dalam sistem internasional (Holsti 1992).

### **Core Values**

#### **A. Kepatuhan terhadap hukum internasional**

Tindakan Australia melakukan kerja sama MCA bersama dengan Filipina di kawasan Indo-Pasifik dilatar belakangi kepentingannya terhadap kepatuhan Australia pada hukum internasional. Salah satu kepentingan inti Australia dalam kerja sama ini adalah kepatuhan terhadap hukum internasional, khususnya terhadap hukum maritim internasional dan khususnya Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) (Raymond, Wawancara 2024). Australia sendiri meratifikasi konvensi ini pada tahun 1994 dan mulai berlaku di tahun yang sama. Bagi Australia yang merupakan negara dengan wilayah maritim terbesar ketiga di dunia sudah banyak memperoleh manfaat besar dari UNCLOS.

Australia sangat diuntungkan oleh UNCLOS yang memberikan kerangka hukum yang memastikan kedaulatan Australia atas zona maritim yang luas termasuk ZEE dan landasan kontinen, serta mendukung pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan (Goodman 2022). Australia juga sangat bergantung pada sumber daya maritim untuk kegiatan ekonomi seperti perikanan, eksplorasi energi lepas pantai, dan perdagangan. Sehingga dapat dikatakan bahwa UNCLOS merupakan landasan bagi kedaulatan, kemakmuran ekonomi, perlindungan lingkungan, dan stabilitas Australia.

Ketertarikan Australia dalam kerja sama dengan Filipina melalui MCA, dianggap sebagai nilai inti dalam kepentingan nasionalnya. Hal ini tercermin dalam Buku Putih Kebijakan Luar Negeri 2017 yang

diterbitkan oleh pemerintah Australia. Komitmen Australia terhadap hukum internasional merupakan landasan dalam kebijakan luar negerinya, sebagaimana ditekankan dalam Buku Putih Kebijakan Luar Negeri 2017 mengenai nilai-nilai Australia (Department of Foreign Affairs 2017). Pada Buku Putih tersebut menegaskan bahwa mempromosikan dan melindungi aturan internasional merupakan hal yang mendasar bagi keamanan dan kemakmuran Australia, memungkinkan kerja sama untuk mengatasi tantangan global.

Dalam konflik laut tiongkok selatan yang merupakan salah satu konflik yang terjadi di Indo-Pasifik, Australia memperlihatkan komitmennya terhadap hukum internasional. Australia bukan negara yang berkonflik dan tidak memiliki klaim atas wilayah di laut tiongkok selatan. Namun, Australia memegang teguh hukum internasional mengenai laut, tepatnya hasil persidangan arbitrase tahun 2016 mengenai klaim Filipina dan Tiongkok yang timpang tindih mengenai batas wilayah maritim (Raymond, Wawancara 2024). Komitmen Australia terhadap hukum internasional ini mencerminkan pengakuan Australia bahwa tatanan internasional yang stabil dan berbasis aturan sangat penting bagi Australia. Kepatuhan terhadap UNCLOS secara langsung mendukung tujuan fundamental Australia, yaitu kedaulatan, keamanan, dan integritas wilayah. UNCLOS menyediakan kerangka hukum untuk menentukan batas maritim dan menyelesaikan sengketa, yang membantu Australia melindungi perairan teritorial dan zona ekonomi eksklusifnya (ZEE) sambil memastikan stabilitas regional.

Kerja sama Australia dengan Filipina melalui *Maritime Cooperative Activity* ini menggambarkan tekad Australia untuk melindungi keamanan negaranya dengan mempertahankan kepatuhan terhadap hukum internasional. Dengan demikian, kerja sama ini dapat dilihat sebagai bentuk dari kepentingan Australia untuk melindungi kepentingannya itu sendiri dan juga keamanan negaranya dari keadaan lingkungan internasional yang anarki. Terutamanya lagi sebagai bentuknya dalam menjaga atau melindungi kepentingan di

kawasan Indo-Pasifik. Melalui kerja sama ini memperlihatkan komitmen kedua negara, terutamanya Australia untuk menjaga kawasan tetap stabil dan menghadapi tantangan di wilayah maritim Indo-Pasifik.

Berdasarkan hasil wawancara dan studi pustaka yang dilakukan, bahwa Australia bekerja sama dengan Filipina melalui MCA menjadi salah satu upayanya dalam melindungi kepentingannya. Kepentingan Australia dalam kepatuhan terhadap hukum internasional menjadi kepentingan intinya karena memastikan keamanan maritim tetap terjaga. Australia sebagai negara *middle power* menganggap penting hukum internasional sebagai caranya untuk mencapai tujuan dalam keamanan khususnya di kawasan Indo-Pasifik tempat Australia menjalankan strategi dan memperluas pengaruhnya. Sebagai negara kekuatan menengah, Australia memandang hukum internasional sebagai hal yang dapat menciptakan lingkungan yang stabil dan aman di kawasan Indo-Pasifik yang sangat penting bagi keberlanjutan perekonomiannya dan keselamatan negaranya.

Di kawasan Indo-Pasifik, di mana sengketa maritim seperti di Laut Tiongkok Selatan mengancam perdamaian dan ketertiban, penegakan hukum internasional membantu mencegah konflik yang dapat mengacaukan kawasan serta memengaruhi keamanan dan kepentingan Australia. Melalui kerja sama MCA bersama dengan Filipina, menjadi salah satu upayanya untuk menjaga keamanan dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik dari ancaman dan tantangan yang ada. Memastikan keamanan dan kedaulatan Australia yang aman dari ancaman di kawasan sebagai tujuan fundamental pada kepentingan inti ini. Dengan tetap memegang teguh hukum internasional seperti halnya mempromosikan UNCLOS melalui kerja sama dengan Filipina, Australia memperkuat kemitraan strategis, membangun kepercayaan, dan memastikan upaya kolektif dalam menegakkan hukum internasional, yang sangat penting bagi kelangsungan Australia dan tujuan strategis jangka panjangnya.

## **B. Mempertahankan *Freedom of Navigation***

Freedom of navigation atau kebebasan bernavigasi merupakan prinsip yang benar-benar dijamin di bawah UNCLOS, memberikan hak kepada semua negara baik negara pantai maupun negara tanpa pantai untuk berlayar di laut lepas. Prinsip kebebasan bernavigasi ini mengizinkan kapal militer lewat bebas di laut lepas, memungkinkan mereka melewati bebas di ZEE, dan memungkinkan mereka memiliki hak lintas damai di dalam perairan teritorial 12 mil laut negara pesisir asalkan mereka mematuhi kondisi tertentu (Raymond, Wawancara 2024). Prinsip ini merupakan prinsip yang dianggap penting oleh Australia. Freedom of navigation sangat penting bagi Australia karena mendukung perekonomian negara yang bergantung pada perdagangan, keamanan energi, dan pertahanan nasional. Australia sebagai negara maritim dengan ZEE yang luas dan jalur perdagangan yang signifikan, sangat bergantung pada kelancara dan keterbukaan jalur pelayaran untuk alasan keamanan dan ekonomi.

Sebagian besar perdagangan Australia baik ekspor maupun impor bergantung pada transportasi maritim yang sebagian besar melewati perairan internasional. Kebebasan navigasi memastikan bahwa jalur perdagangan vital ini tetap terbuka, sehingga mendukung ekonomi Australia. Selain itu, keamanan maritim negara ini juga sangat bergantung pada kemampuan untuk menjaga akses ke jalur laut yang penting. Gangguan terhadap jalur-jalur ini, seperti sengketa teritorial atau blokade, dapat mengancam keamanan Australia dengan memutuskan akses ke sumber daya, pasar, dan pasokan penting (Brewster 2018). Dukungan terhadap kebebasan navigasi memungkinkan Australia melindungi kepentingan keamanannya sekaligus memastikan jalur laut tetap aman dan dapat diakses.

Di kawasan Indo-Pasifik yang menjadi pusat ketegangan geopolitik seperti sengketa Laut Tiongkok Selatan, semakin memperkuat urgensi kebebasan navigasi. Hasil pengadilan arbitrase pada tahun 2016 yang menetapkan klaim Tiongkok tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Namun, Tiongkok

terus mengabaikan keputusan tersebut dan memperkuat kehadirannya di Laut Tiongkok Selatan dengan aktivitas militer dan reklamasi (Cook 2021). Dengan melaksanakan hak kebebasan bernavigasi, negara-negara dapat menentang klaim sepihak yang tidak sesuai dengan UNCLO seperti klaim nine-dash line milik Tiongkok. Aksi kebebasan navigasi menunjukkan bahwa negara-negara tidak mengakui klaim yang bertentangan dengan hukum internasional, sehingga mencegah legitimasi klaim tersebut (Cook 2021). Sebagai kekuatan menengah, komitmen Australia terhadap kebebasan navigasi juga sejalan dengan tujuan kebijakan luar negerinya untuk menegakkan tatanan internasional berbasis aturan, memperkuat kemitraan strategis, dan meningkatkan pengaruhnya di tingkat regional dan global.

Kerja sama yang dilakukan Australia dengan Filipina melalui MCA ini didasari oleh prinsip freedom of navigation atau kebebasan navigasi yang dijamin di bawah UNCLOS. Joint statement yang dikeluarkan oleh kedua negara terkait MCA juga menekankan bahwa kerja sama ini didasari oleh komitmen yang sama diantara keduanya dalam menjalankan hak kebebasan bernavigasi dan penerbangan yang sesuai dengan hukum internasional, khususnya UNCLOS dalam mendukung Indo-Pasifik yang damai, aman, dan stabil (Departement of National Defense Republic of The Philippines 2023). Mempertahankan kebebasan navigasi ini mencerminkan komitmen kedua negara untuk mengelola ancaman terhadap keamanan dan kepentingan nasional masing-masing negara.

Kerja sama MCA ini menjadi salah satu cara Australia untuk melindungi kepentingannya yaitu mempertahankan kebebasan navigasi. Australia dan Filipina dalam kerja sama ini sama-sama memandang bahwa adanya tantangan di kawasan Indo-Pasifik yang perlu untuk diatasi. Jalur perdagangan dan keamanan maritim di kawasan menjadi hal penting untuk Australia perhatikan. Australia sangat bergantung pada keamanan dan stabilitas dalam sistem internasional yang anarki, sehingga Australia perlu untuk melindungi

kepentingan nasionalnya di Indo-Pasifik khususnya untuk menjaga akses ke jalur perdagangan. Melalui kerja sama ini Australia dapat melindungi kepentingannya dalam bernavigasi di kawasan.

Mempertahankan freedom of navigation menjadi kepentingan inti Australia karena melindungi perekonomian serta keamanan Australia sebagai hal vital yang harus dijaga. Melalui MCA ini Australia mempertahankan haknya dalam bernavigasi sebagai caranya dalam melindungi perekonomian dan keamanan negaranya dari ancaman yang timbul di kawasan Indo-Pasifik seperti tindakan koersi Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan yang mengancam keamanan kawasan. Melalui kerja sama ini Australia ingin memastikan bahwa mereka dapat terus mengakses jalur perdagangan dan mengurangi ancaman terhadap kepentingan nasionalnya. Kerja sama ini merupakan sebuah respon Australia terhadap meningkatnya tantangan terhadap kebebasan bernavigasi di kawasan. Melalui kerja sama ini menunjukkan Australia sebagai negara middle-power memanfaatkan kerja sama bilateral untuk menyeimbangkan kekuatan dengan tantangan di Indo-Pasifik seperti Tiongkok. Dengan demikian, mempertahankan freedom of navigation ini menunjukkan tekad Australia untuk mendukung prinsip FOIP dan upaya Australia menjaga Indo-Pasifik sebagai kawasan yang stabil di mana semua negara memiliki hak yang sama dalam mengakses dan menggunakan perairan internasional secara damai.

### **C. Bekerja sama dengan negara berpikiran sama di kawasan**

Kerja sama MCA yang dilakukan Australia dan Filipina dilakukan diantara dua negara yang memiliki pemikiran atau pandangan yang sama terhadap kawasan. Kepentingan Australia dalam kerja sama dengan berpikiran sama melalui MCA menjadi salah satu kepentingan yang termasuk ke dalam kepentingan inti. Narasumber pada penelitian ini, Gregory Raymon mengatakan:

“Bekerja sama dengan negara berpikiran sama mungkin akan menjadi nilai inti lainnya, jadi Australia, Amerika Serikat meskipun belum menandatangani UNCLOS tetapi masih mematuhi, dan Filipina yang menandatangani, jadi Australia

memiliki nilai bahwa akan bekerja sama dengan negara-negara yang berpikiran sama untuk mendukung kebebasan navigasi internasional (Raymond, Wawancara 2024).”

Kolaborasi Australia dengan Filipian dalam kegiatan MCA ini menegaskan kepentingan strategisnya untuk bermitra dengan negara-negara yang sejalan dalam mendukung tatanan internasional berbasis aturan. Kemitraan ini sangat penting untuk menghadapi tantangan keamanan bersama, termasuk sengketa teritorial dan tindakan koersif di perairan yang disengketakan seperti Laut Tiongkok Selatan.

Kepentingan ini juga tercantum dalam buku putih Kebijakan Luar Negeri Australia tahun 2017. Bab enam dari Buku Putih mengenai “kemitraan global kami”, menjelaskan strategi Australia untuk bekerja sama dengan negara-negara yang memiliki visi serupa guna memperkuat sistem multilateral, menegakkan hukum internasional, dan menangani ancaman keamanan bersama (Department of Foreign Affairs 2017). Pemerintah Australia secara tegas menekankan pentingnya berkolaborasi dengan negara-negara yang memiliki pandangan sama untuk menegakkan tatanan internasional berbasis aturan dan mempromosikan nilai-nilai bersama. Pernyataan ini diuraikan pula dalam Buku Putih Pertahanan Australia tahun 2016 mengenai pentingnya aliansi dengan negara-negara yang memiliki nilai dan tujuan yang serupa. Buku Putih Pertahanan 2016 menegaskan komitmen Australia untuk bekerja sama dengan negara-negara yang memiliki pandangan serupa guna meningkatkan keamanan regional dan menegakkan tatanan internasional berbasis aturan (Australian Government Department of Defence 2016). Dokumen ini menekankan pentingnya kemitraan dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan sekutu regional lainnya untuk menghadapi tantangan keamanan bersama serta mempromosikan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik.

*Maritime Cooperative Activity* ini menjadi salah satu upaya Australia dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Australia bekerja sama dengan negara berpikiran sama merupakan sebuah langkah dalam menghadapi tantangan dari sistem internasional yang anarki.

Adanya tantangan tersebut, melalui MCA ini kerja sama bilateral bahkan multilateral dapat dilakukan guna mengatasi ancaman tersebut. Melalui kerja sama dengan Filipina ini, Australia didasari oleh tujuannya dalam melindungi kepentingannya di kawasan Indo-Pasifik.

Bekerja sama dengan negara yang memiliki pemikiran serupa menjadi kepentingan inti karena Australia bergantung pada kemitraan ini untuk memperkuat keamanan nasional, terutama dalam menghadapi tantangan di kawasan dengan melakukan aliansi dengan negara berpikiran sama. Selain itu, kerja sama ini memungkinkan Australia untuk menghadapi tantangan keamanan bersama, seperti salah satunya ketegangan di kawasan oleh Tiongkok. Kerja sama MCA ini juga menjadi tempat bagi Australia untuk mempererat kerja sama militer antara sekutu-sekutu yang terlibat. Inisiatif ini dapat berfungsi sebagai tempat bagi negara-negara di kawasan Indo-Pasifik yang berminat untuk berkontribusi, sebagaimana ditunjukkan oleh partisipasi Australia dan Amerika Serikat saat MCA diperkenalkan pada tahun 2023.

#### **D. Mempertahankan hubungan bilateral dengan negara di Asia Tenggara**

Mempertahankan hubungan bilateral antara Australia dengan negara di Asia Tenggara menjadi kepentingan inti Australia lainnya. Kepentingan Australia dalam menjaga hubungan bilateral yang positif dengan negara-negara Asia Tenggara, termasuk Filipina, merupakan nilai inti dalam kepentingan nasionalnya karena mendukung stabilitas regional, pertumbuhan ekonomi, dan peran Australia di kawasan Indo-Pasifik. “Nilai-nilai lainnya adalah untuk menjaga hubungan dengan negara-negara Asia Tenggara, secara umum mereka penting untuk Australia (Raymond, Wawancara 2024).” Australia memandang Asia Tenggara sebagai sebuah kawasan yang sangat penting bagi kepentingan Australia di berbagai bidang.

Asia Tenggara menjadi sebuah kawasan penting di Indo-Pasifik bagi Australia. Buku Putih Kebijakan Luar Negeri Australia tahun 2017 menekankan bahwa kawasan ini memiliki peran sentral dalam

stabilitas dan tata kelola kawasan. Asia Tenggara sangat penting bagi keamanan dan kemakmuran Australia, sehingga adanya komitmen Australia untuk bekerja sama dengan negara-negara Asia Tenggara dalam menghadapi tantangan bersama seperti keamanan maritim, terorisme, dan integrasi ekonomi (Department of Foreign Affairs 2017). Merupakan kepentingan nasional Australia untuk memiliki negara-negara yang aman dan makmur di kawasan terdekatnya.

Mempertahankan hubungan bilateral yang positif dengan negara di Asia Tenggara salah satunya adalah dengan Filipina. Sebagai salah satu negara di Asia Tenggara, Filipina merupakan mitra regional yang penting bagi Australia karena lokasi strategisnya di Asia Tenggara dan pendekatan serupa terhadap isu-isu keamanan (Australian Government Department of Defence 2016). Kerja sama dengan Filipina melalui MCA memungkinkan Australia untuk berkontribusi dalam menangani tantangan regional, seperti sengketa maritim dan ancaman terhadap kebebasan navigasi yang berdampak pada keamanan kawasan. Filipina yang memiliki permasalahan sengketa dengan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan menjadi target utama koersi Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan dengan melibatkan penggunaan atau ancaman kekerasan (Nguyen 2024). Keterbatasan Filipina dalam menanggapi ancaman keamanan maritim dikarenakan tidak memadainya sumber daya yang dimiliki untuk berpatroli apalagi untuk melakukan operasi guna mencegah ancaman. Australia sebagai negara dengan kepentingan besar di kawasan dapat membantu melalui kegiatan kerja sama.

Kerja sama MCA ini menjadi salah satu upaya Australia dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Mempertahankan hubungan bilateral dengan negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Filipina merupakan langkah Australia dalam menghadapi tantangan yang diakibatkan keadaan sistem internasional yang anarki. Tindakan Australia dalam menjalin kerja sama MCA sebagai upayanya untuk mempertahankan hubungan bilateral didasari oleh kepentingannya di kawasan Indo-Pasifik. Selain itu, melalui kerja sama ini Australia

menyeimbangkan kekuatan di kawasan sebagai upaya menjaga keamanan maritim dan kebebasan navigasi di Indo-Pasifik.

Sebagai negara yang mengedepankan kerja sama strategis, hubungan bilateral Australia dengan Filipina dapat menjadi caranya untuk memperluas pengaruhnya di Asia Tenggara. Kerja sama ini membantu Australia menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan, khususnya di tengah meningkatnya ketegangan di Laut Tiongkok Selatan. Bagi Australia, memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Filipina melalui MCA merupakan langkahnya untuk mengamankan kepentingan nasionalnya di kawasan Indo-Pasifik. Dengan membangun hubungan dengan Filipina, Australia memperkuat aliansinya di Asia Tenggara yang merupakan kawasan strategis bagi kepentingan ekonomi dan keamanan Australia. Melalui MCA, Australia tidak hanya mempererat hubungan bilateral dengan Filipina, tetapi juga memperkuat posisinya di kawasan Asia Tenggara sebagai komitmennya untuk menjaga keamanan dan stabilitas regional. Sebagai negara middle-power juga Australia tidak memiliki kekuatan hegemonik seperti Amerika Serikat atau Tiongkok, sehingga memiliki hubungan dengan negara-negara di Asia Tenggara menjadi upayanya untuk menyeimbangkan kekuatan untuk menghadapi dinamika geopolitik Indo-Pasifik. Kerja sama MCA ini tidak hanya memastikan kepentingannya dalam menjaga keamanannya, tetapi juga menghindari dominasi kekuatan besar yang dapat mengancam tatanan regional dan kepentingannya di kawasan.

### ***Middle-range Objectives***

#### **A. Memberi dukungan kepada Filipina**

Kepentingan jangka menengah Australia dalam kerja sama MCA dengan Filipina salah satunya dapat dilihat dari dukungannya kepada Filipina. Melalui kerja sama MCA ini, Australia menunjukkan dukungannya untuk Filipina, menunjukkan dukungan untuk Filipina di bawah hukum internasional serta menunjukkan dukungan untuk hukum internasional (Raymond, Wawancara 2024). Dukungan Australia terhadap Filipina karena adanya klaim maritim yang saling

tumpang tindih antara Tiongkok dan Filipina di wilayah sengketa Laut Tiongkok Selatan. Dukungan ini ditunjukkan Australia melalui dukungannya pada putusan arbitrase Laut Tiongkok Selatan tahun 2016. Dukungan yang diberikan oleh Australia kepada Filipina dalam penggunaan arbitrase sebagai bentuk penyelesaian sengketa internasional juga sebagai respon terhadap ancaman dari Tiongkok di kawasan (Maitem 2024). Dukungan Australia kepada Filipina ini sejalan dengan strategi pertahanan nasionalnya yang menekankan keamanan kolektif dan pencegahan. Australia merupakan mitra pertahanan terpenting kedua dari Filipina dan secara historis tidak diarahkan pada masalah keamanan eksternal seperti di Laut Filipina Barat, sebutan untuk wilayah yang disengketakan di LTS dan hanya difokuskan pada keamanan dalam negeri (Patton 2024). Kerja sama MCA menunjukkan bahwa Australia meningkatkan kehadirannya di LTS dengan bergabung dalam kerja sama MCA dengan Filipina. Hal ini menunjukkan dukungannya terhadap Filipina.

Dukungan yang dilakukan Australia ini mencakup penguatan kemampuan maritim Filipina, seperti patroli bersama dan pelatihan angkatan laut dengan tujuan menjaga kedaulatan maritim, memastikan kebebasan navigasi, dan menegakkan aturan berbasis hukum di wilayah sengketa seperti Laut Tiongkok Selatan. Australia menekankan bahwa posisi Australia mengenai isu di Laut Tiongkok Selatan atau disebut juga Laut Filipina Barat akan tetap konsisten (Khaliq 2023). Australia menegaskan dukungannya terhadap putusan arbitrase tahun 2016 yang membatalkan klaim luas Tiongkok atas Laut Tiongkok Selatan. Australia memberi pernyataan bahwa Australia dan Filipina adalah dua negara yang berkomitmen pada gagasan dunia di mana perselisihan diselesaikan dengan mengacu pada hukum internasional (Reuters 2023). Kerja sama ini mencerminkan komitmen Australia terhadap stabilitas kawasan dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip hukum internasional. MCA ini juga menjadi salah satu platform bagi Australia untuk mendukung angkatan laut Filipina dan juga membangun kepercayaan dan kebiasaan kerja sama bersama

dengan Angkatan Laut Filipina dan juga dengan negara aliansi lainnya seperti Amerika Serikat dan Jepang (Raymond, Wawancara 2024). Bekerja sama dengan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik, seperti Filipina serta negara yang sama-sama menjadi negara aliansi dengan Amerika Serikat yaitu Jepang membantu Australia untuk membangun kerja sama maritim yang lebih kuat dan membangun hubungan strategisnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan studi kepustakaan yang dilakukan, bahwa memberi dukungan kepada Filipina termasuk ke dalam kepentingan jangka menengah Australia karena melibatkan langkah untuk mencapai kepentingan yang lebih luas, seperti stabilitas regional, kerja sama ekonomi, atau meningkatkan pengaruh diplomatik. Dengan memberikan dukungan kepada negara lain dalam hal ini Filipina yang berkaitan pula dengan dukungan terhadap hukum internasional UNCLOS, dapat memperkuat reputasi Australia sebagai negara yang berkomitmen terhadap keamanan kawasan terutama pada jalur perdagangannya. Dukungan yang diberikan Australia kepada Filipina terhadap klaim teritorialnya pada putusan arbitrase menjadi salah satu kepentingan Australia. Tiongkok sebagai negara rising power di kawasan Indo-Pasifik tentunya memiliki kapabilitas lebih besar, dengan memberi dukungan terhadap Filipina sebagai cara untuk menyeimbangkan pengaruh Tiongkok di kawasan terutama dalam kasus sengketa teritorial di kawasan. Kerja sama MCA yang dilakukan Australia dan Filipina ini didasarkan adanya tekanan atau ancaman yang sama dari luar sehingga mempengaruhi tindakannya.

## **B. Mengamankan Jalur Perdagangan**

Kerja sama MCA antara Australia dengan Filipina juga merupakan langkah Australia untuk mengamankan jalur perdagangannya. Australia merupakan negara perdagangan utama dengan ekonomi terbesar ke-13 dunia, pemain maritim regional di Indo-Pasifik, serta kekuatan menengah dengan peran strategis di Indo-Pasifik, Australia memiliki kepentingan yang mendalam dalam menjaga stabilitas regional, termasuk melalui manfaat yang diperoleh dari

kekebasan navigasi, perdagangan internasional, dan diplomasi multilateral (Medcalf 2016). Jalur perdagangan memiliki peran krusial bagi perekonomian Australia, sehingga Australia menekankan pentingnya memastikan perdagangan internasionalnya tetap berjalan lancar tanpa hambatan. Australia sangat bergantung pada perdagangan dan juga pada aliran bebas perdagangan merupakan hal yang penting bagi Australia.

Pentingnya mengamankan jalur perdagangan Australia ini dikarenakan sekitar lebih dari 50% ekspor Australia pergi ke Asia Timur Laut seperti ke Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan (Raymond, Wawancara 2024). Ekspor yang dilakukan Australia ini sebagian besar dilakukan melalui jalur laut dan sebagian besarnya melalui Laut Tiongkok Selatan. Buku Putih Pertahanan tahun 2016 Australia mencatat bahwa hampir dua pertiga ekspor Australia melewati Laut Tiongkok Selatan termasuk ekspor utamanya yaitu batu bara, bijih besi, dan gas alam cair (Australian Government Department of Defence 2016). Ketergantungan Australia pada bahan bakar cair yang diimpor melalui rute pelayaran Laut Tiongkok Selatan dengan mengimpor sebesar 90% bahan bakar olahan (Oloruntoba et al. 2022). Ketidakstabilan kawasan Indo-Pasifik terutama di wilayah Laut Tiongkok Selatan memberikan ancaman pada rantai pasokan maritim Australia di seluruh kawasan Indo-Pasifik.

Rute perdagangan yang melewati Laut Tiongkok Selatan ini memasok 90% impor bahan bakar olahan yang berasal dari Korea Selatan, Singapura, Jepang, Malaysia, Taiwan, Brunei, dan Vietnam (Oloruntoba et al. 2022). Meskipun rute perdagangan antara negara-negara ini dan Australia tidak langsung melintas ke Laut Tiongkok Selatan, sebagian besar minyak mentah yang diimpor oleh negara-negara tersebut untuk menghasilkan bahan bakar olahan tetap melalui rute Laut Tiongkok Selatan. Sebagai salah satu jalur perdagangan utama dunia, Laut Tiongkok Selatan berperan sebagai penghubung yang mengatur arus perdagangan antara kawasan Utara dan Selatan di Asia Timur (Huynh 2017). Jalur maritim yang menghubungkan

Australia dengan negara-negara Asia Timur Laut secara langsung melintasi wilayah ini.

Berdasarkan hasil wawancara dan studi pustaka, dapat dikatakan Australia melalui kerja sama MCA dengan Filipina mencoba melindungi kepentingannya dengan mengamankan jalur perdagangan. Australia sangat bergantung pada perdagangan internasional yang sebagian besar dilakukan melalui jalur laut, termasuk kawasan Asia Tenggara dan perairan Filipina. Sehingga menjaga keamanan jalur perdagangan ini penting untuk kelangsungan ekonominya. Adanya ancaman di kawasan membuat Australia khawatir akan keamanan jalur perdagangannya ini. Stabilitas kawasan akan memastikan perdagangan maritim Australia menguntungkan. Kemakmuran Australia dan masalah keamanan regional telah saling terkait. Melihat adanya ancaman dan tantangan pada jalur perdagangan yang mengancam kepentingannya ekonominya, menjadi dasar Australia dalam bertindak dengan melakukan kerja sama dengan Filipina dalam MCA. Melalui MCA ini Australia diuntungkan dengan memastikan keselamatan jalur perdagangannya.

### ***Long-range Objectives***

#### **A. Tatahan global berbasis aturan (*rules-based order*)**

Kepentingan Australia pada kerja sama MCA dengan Filipina juga dapat dilihat dari bagaimana Australia berkomitmen dalam tujuannya untuk mencapai tatanan internasional berbasis aturan. Australia dalam bertindak di kancah internasional berkomitmen untuk mempromosikan tatanan global berbasis aturan atau *rules-based order* di terutama di kawasan Indo-Pasifik. Tujuan kebijakan luar negeri jangka panjang yang dimiliki Australia yang lebih penting adalah memastikan kawasan agar berkembang dengan damai dan tanpa mengikis prinsip yang menjadi fondasi kemakmuran dan hubungan kerja sama Indo-Pasifik (Yadav 2022). Tatahan global berbasis aturan ini mengacu pada kerangka tata kelola global di mana hubungan internasional dijalankan berdasarkan hukum, norma, dan perjanjian yang telah ditetapkan serta bukan melalui penggunaan kekuatan

sepihak (Conley, Gyngell, and Wakefield 2021). Bagi Australia, pandangannya ini sebagai elemen kunci untuk memastikan stabilitas, keamanan, dan kesejahteraan baik di tingkat regional maupun global.

Kepentingan tatanan berbasis aturan ini ditekankan pula pada dokumen Buku Putih Pertahanan 2016 Australia. Menekankan pentingnya mempertahankan tatanan global berbasis aturan dalam menghadapi tantangan seperti sengketa wilayah dan koersi di kawasan khususnya di kawasan Indo-Pasifik (Australian Government Department of Defence 2016). Selain itu juga Buku Putih Kebijakan Luar Negeri 2017 Australia menekankan juga hal tersebut. Penekanan Australia pada tatanan global berbasis aturan sejalan dengan tujuan strategis Australia, seperti menjamin stabilitas regional dan keamanan ekonomi, melindungi kebebasan bernavigasi dan jalur perdagangan terbuka, dan memperkuat aliansi untuk menegakkan norma internasional.

Tatanan dunia berbasis aturan ini menjadi salah satu cita-cita dan pandangan Australia yang selaras dengan tujuannya dalam menjaga stabilitas kawasan serta memperkuat keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Namun, Australia terkadang sedikit selektif dalam hal mendukung hukum internasional. Gregory Raymond sebagai narasumber untuk penelitian ini menjelaskan:

“Australia terkadang sedikit selektif dalam hal mendukung hukum internasional karena Australia juga telah melanggar hukum internasional, khususnya pada tahun 2003 ketika Australia mendukung invasi ilegal ke Irak. Australia menginginkan hukum internasional untuk diterapkan, tetapi juga terkadang mengabaikan aspek lain dan pelanggaran hukum internasional lainnya (Raymond, Wawancara 2024).”

Bukan hanya Australia saja, beberapa negara yang memiliki pandangan sama mengenai tatanan berbasis aturan pun mengesampingkan aturan ketika hal tersebut sesuai dengan kepentingan nasionalnya (Milner 2024). Australia dalam patuh terhadap hukum internasional dan aturan tetap mengedepankan yang sesuai dengan kepentingannya.

Pandangan Australia akan tatanan global berbasis aturan merupakan kepentingan Australia dalam kerja sama MCA bersama Filipina di kawasan Indo-Pasifik. Melalui kerja sama MCA ini terdapat kepentingan Australia yang ingin dilindungi dan dicapainya. Australia dalam mematuhi aturan dan hukum yang berlaku ditentukan berdasarkan kesesuaian dengan kepentingan yang dimiliki oleh negaranya. Pandangan Australia terhadap tatanan berbasis aturan ini merupakan cita-citanya dan menjadi bagian dari strateginya untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya. Dengan pandangannya ini, Australia berupaya menyeimbangkan kekuatan, memperkuat keamanannya, serta memastikan stabilitas Indo-Pasifik demi kepentingan intinya. Kerja sama MCA antara Australia dan Filipina mencerminkan kepentingan jangka panjang Australia dalam menjaga tatanan global berbasis aturan. Melalui kerja sama ini keduanya sama-sama memastikan kawasan Indo-Pasifik yang tetap stabil, aman, terbuka untuk semua negara.

## **KESIMPULAN**

Kawasan Indo-Pasifik telah menjadi tempat yang penting untuk kegiatan geopolitik, keamanan, hingga perdagangan. Terlepas dari peran penting yang dimilikinya, kawasan Indo-Pasifik memiliki berbagai tantangan keamanan maritim serta potensi besar yang dimilikinya menciptakan dinamika keamanan yang kompleks. Keamanan di wilayah ini sangatlah penting bagi banyak negara di dalamnya termasuk Australia, sehingga keadaan yang aman dan stabil di kawasan ini sangatlah diperlukan. Kerja sama *Maritime Cooperative Activity* yang dilakukan Australia dan Filipina ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan oleh Tiongkok di kawasan. Melalui kerja sama ini terdapat kepentingan Australia yang mendasarinya dalam melakukan kerja sama MCA tersebut di wilayah Indo-Pasifik. Berdasarkan hasil pembahasan kepentingan Australia dalam kerja sama dengan Filipina melalui *Maritime Cooperative Activity (MCA)* di Kawasan Indo-Pasifik tahun 2023 dibagi menjadi tiga kategori yaitu kepentingan inti, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjang.

Kepentingan inti yang bersifat vital bagi Australia yaitu komitmen terhadap hukum internasional, mempertahankan *freedom of navigation*, bekerja sama dengan negara berpikiran sama, dan mempertahankan hubungan bilateral yang positif dengan negara-negara di Asia Tenggara. Kemudian kepentingan dengan tujuan jangka menengah (*middle-range objectives*) yaitu memberi dukungan kepada Filipina dan mengamankan jalur perdagangan Australia. Terakhir kepentingan jangka panjang (*long-range objectives*) Australia adalah tatanan global berbasis aturan (*rules-based order*). Kepentingan Australia ini menjadi salah satu yang mendorongnya dalam melakukan hubungan luar negeri dan juga untuk mencapai visi dan tujuan Australia itu sendiri terutama di kawasan Indo-Pasifik. Melalui kerja sama ini, Australia menunjukkan perannya sebagai kekuatan menengah di kawasan Indo-Pasifik dengan berupaya menjaga keseimbangan kekuatan serta melindungi kepentingannya di tengah perubahan dinamika geopolitik yang berkembang di kawasan.

## **REFERENSI**

- Alexander, Lloyd, and M Adducul. 2018. "The Indo-Pacific Construct in Australia's White Papers: Reflections for ASEAN-Australia Future Strategic Partnership," no. 6.
- Australian Government Department of Defence. 2016. "Australia Defence White Paper 2016."
- Baquisal, Justin. 2023. "Slow and Steady Wins the Race: Philippines-Australia Relations in 2023." September 18, 2023. <https://asialink.unimelb.edu.au/insights/slow-and-steady-wins-the-race-philippines-australia-relations-in-2023>.
- Bautista, Lowell. 2024. "The Philippines-Australia Strategic Partnership in an Era of Geopolitical Realignment | FULCRUM." March 21, 2024. <https://fulcrum.sg/the-philippines-australia-strategic-partnership-in-an-era-of-geopolitical-realignment/>.
- Brewster, David. 2018. "A 'Free and Open Indo-Pacific' and What It Means for Australia." March 7, 2018. <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/free-open-indo-pacific-what-it-means-australia>.

- Conley, Melissa, Tyler Allan Gyngell, and Bryce Wakefield. 2021. *Australia and the Rules-Based International Order*. [www.internationalaffairs.org.au](http://www.internationalaffairs.org.au).
- Cook, Malcolm. 2021. "Australia's South China Sea Challenges." May 26, 2021. <https://www.lowyinstitute.org/publications/australia-s-south-china-sea-challenges>.
- Defence Minister of Australian Government. 2023. "Partnerships Strengthened in the Philippines | Defence." December 1, 2023. <https://www.defence.gov.au/news-events/news/2023-12-01/partnerships-strengthened-philippines>.
- Departement of National Defense Republic of The Philippines. 2023. "Joint Statement Philippines-Australia Maritime Cooperation Activity."
- Department of Foreign Affairs. 2017. *2017 Foreign Policy White Paper*.
- Gill, Don McLain. 2023. "Navigating Contemporary Philippine Foreign Policy Under Marcos Jr." *ORF Issue Brief*, no. 645 (June). [https://www.orfonline.org/wp-content/uploads/2023/06/ORF\\_IssueBrief\\_645\\_PHForeignPolicy-MarcosJr.pdf](https://www.orfonline.org/wp-content/uploads/2023/06/ORF_IssueBrief_645_PHForeignPolicy-MarcosJr.pdf).
- Goodman, Camille. 2022. "Girt by Sea, and by the Law of the Sea: Why UNCLOS Matters to Australia | FULCRUM." September 27, 2022. <https://fulcrum.sg/girt-by-sea-and-by-the-law-of-the-sea-why-unclos-matters-to-australia>.
- Halvorson, Dan, and Lucy West. 2020. "A Retrospective on the Australia-Philippines Political and Security Relationship: On Canberra's Terms?" *Australian Journal of International Affairs* 74 (5): 557-77. <https://doi.org/10.1080/10357718.2020.1725424>.
- Holsti, Kalevi Jaakko. 1992. *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis*. Bandung: Binacipta.
- Huynh, Sang Tam. 2017. "Australia's Engagement in the South China Sea under the Prospect Theory Approach and Implications for Australia-Vietnam Relations." *Asian Culture and History* 9 (2): 60. <https://doi.org/10.5539/ach.v9n2p60>.

- Izuyama, Marie, and Yusuke Ishihara. 2019. "Australia, India and the Indo-Pacific Concept." <https://www.nids.mod.go.jp/english/publication/east-asian/>.
- Khaliq, Riyaz ul. 2023. "Australia Dukung Filipina Atas Klaim Di Laut Cina Selatan." September 8, 2023. <https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/australia-backs-philippines-over-claims-in-south-china-sea/2986432#>.
- Mahnken, Thomas G. 2011. "Indo-Pacific Maritime Security in the 21 St Century." Vol. 22.
- Maitem, Jeffrey. 2024. "Australia to Boost South China Sea Presence by Joining Philippines' Maritime Defence Patrols | South China Morning Post." September 17, 2024. [https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3278894/australia-boost-south-china-sea-presence-joining-philippines-maritime-defence-patrols?module=perpetual\\_scroll\\_0&pgtype=article](https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3278894/australia-boost-south-china-sea-presence-joining-philippines-maritime-defence-patrols?module=perpetual_scroll_0&pgtype=article).
- Medcalf, Rory. 2016. "Rules, Balance, and Lifelines: An Australian Perspective on the South China Sea." *Asia Policy*, no. 21. <https://doi.org/10.2307/24905083>.
- Milner, Anthony. 2024. "Australia's Dealings with Asia Should Focus on Rules, Not the 'Rules-Based Order' | East Asia Forum." Eastasiaforum. August 11, 2024. <https://eastasiaforum.org/2024/08/11/australias-dealings-with-asia-should-focus-on-rules-not-the-rules-based-order/>.
- Misalucha-Willoughby, Charmaine, and Francis C Domingo. 2019. *Enhancing Australia-Philippine Cooperation: Diversifying Strategic Options*. Manila: Stratbase ADRI. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29498.75200/1>.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nguyen, Hanh. 2024. "Southeast Asian Maritime Security: Australia Can Help | Lowy Institute." February 6, 2024. <https://www.lowyinstitute.org/the-interpretor/southeast-asian-maritime-security-australia-can-help>.

- Oloruntoba, Richard, Booi Kam, Hong-Oanh Nguyen, Matthew Warren, Prem Chhetri, and Vinh Thai. 2022. "Konflik Di Laut Cina Selatan Mengancam 90% Impor Bahan Bakar Australia: Studi." 2022. <https://theconversation.com/conflict-in-the-south-china-sea-threatens-90-of-australias-fuel-imports-study-188148>.
- Patton, Susannah. 2024. "What Should Australia Be Doing about the South China Sea? | Lowy Institute." April 5, 2024. <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/what-should-australia-be-doing-about-south-china-sea>.
- Presidential Communications Office Philippines. 2023. "PH, Australia Elevate Ties with New 'Joint Declaration on Strategic Partnership.'" September 8, 2023. [https://pco.gov.ph/news\\_releases/ph-australia-elevate-ties-with-new-joint-declaration-on-strategic-partnership/](https://pco.gov.ph/news_releases/ph-australia-elevate-ties-with-new-joint-declaration-on-strategic-partnership/).
- Reuters. 2023. "Australia Says It Will Conduct More Joint Patrols with Philippines in South China Sea | Reuters." August 25, 2023. <https://www.reuters.com/world/australia-says-it-will-conduct-more-joint-patrols-with-philippines-south-china-2023-08-25/>.
- Romana, Fransisca. 2023. "Hadang China, Filipina-Australia Patroli Bersama - Kompas.Id." November 25, 2023. [https://www.kompas.id/baca/english/2023/11/25/hadang-china-filipina-australia-patroli-bersama?open\\_from=Translator\\_Mark](https://www.kompas.id/baca/english/2023/11/25/hadang-china-filipina-australia-patroli-bersama?open_from=Translator_Mark).
- Rosdiana, Hesti. 2021. "Keamanan Maritim Di Kawasan Indo-Pasifik." In *Tinjauan Multiperspektif Kawasan Indo-Pasifik: Peluang Dan Tantangan*, edited by Laode Muhamad Fathun and Rika Isnarti, 61–79. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tertia, Joseph, Anak Agung, Banyu Perwita, and Kata Kunci. 2018. "Maritime Security in Indo-Pacific: Issues, Challenges, and Prospects." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 14 (1).
- Yadav, Abhiram Singh. 2022. *Indo-Pasifik: Sebuah Konstruksi Geopolitik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.